

Analisis Kepercayaan Publik dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Tinjauan Pustaka

Fajar Alan Syahrir^{*1}, M.Wira Anshori² Aisah Putri Ainur Aji³, Dwira Maisa Ablianti⁴

^{1,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi

e-mail: ^{*1}fajarsyahrir@unja.ac.id

Diterima: 9 Juli 2026.

Direview: 22 September 2026.

Diterbitkan: 22 September 2026.

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Abstract – The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the strategic policies of the Indonesian government aimed at improving the nutritional quality of the community while also supporting human resource development toward the Golden Indonesia 2045. The success of the implementation of this program is not only determined by the availability of resources but also by the level of public trust in the administration of the policy. This research aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program in various scientific studies, identify factors influencing public trust, and develop a conceptual synthesis regarding efforts to build public trust in the implementation of the program. The research uses a literature review method by examining various scientific articles, books, research reports, and relevant policy documents regarding school meal programs, public policy implementation, governance, and public trust. Data is analyzed using content analysis techniques through the processes of identification, theme grouping, interpretation, and synthesis of various research findings. The study results show that the implementation of the Free Nutritious Meal Program is influenced by the quality of governance, implementation capacity, and collaboration among stakeholders. Public trust in the program is shaped by four main dimensions: transparency and accountability, implementation quality and food safety, participation and social collaboration, and effective public communication. Literature synthesis shows that public trust is an important prerequisite for the legitimacy, acceptance, and sustainability of the implementation of the Free Nutritious Meal Program. Therefore, strengthening transparent governance, improving implementation quality, engaging the community, and participatory public communication need to be prioritized to support the program's success.

Keywords - Public Trust, Free Nutritious Meal Program (MBG), Policy Implementation, Governance, Literature Review.

Abstrak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Keberhasilan implementasi program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam berbagai kajian ilmiah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan publik, serta menyusun sintesis konseptual mengenai upaya membangun kepercayaan publik dalam implementasi program tersebut. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai program pemberian makan sekolah, implementasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses identifikasi, pengelompokan tema, interpretasi, dan sintesis berbagai temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas implementasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kepercayaan publik terhadap program dibentuk oleh empat dimensi utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas, kualitas implementasi dan keamanan pangan, partisipasi serta kolaborasi sosial, dan komunikasi publik yang efektif. Sintesis literatur menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan prasyarat penting bagi legitimasi, penerimaan, dan keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang transparan, peningkatan kualitas implementasi, pelibatan masyarakat, dan

komunikasi publik yang partisipatif perlu menjadi prioritas dalam mendukung keberhasilan program.

Kata Kunci – Kepercayaan Publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan, Studi Pustaka.

I. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi pada usia sekolah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesehatan, kemampuan kognitif, prestasi belajar, serta produktivitas masyarakat di masa depan [1], [2].

Secara global, program pemberian makan di sekolah (*school feeding programme*) telah diterapkan di berbagai negara sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi malnutrisi, meningkatkan partisipasi pendidikan, dan memperkuat perlindungan sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi program tersebut mampu meningkatkan angka kehadiran siswa, mengurangi angka putus sekolah, memperbaiki status gizi, serta memberikan dampak positif terhadap capaian akademik [3]–[5]. Selain manfaat kesehatan dan pendidikan, program pemberian makan sekolah juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pangan daerah dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan sekolah menghadapi [6].

Di Indonesia, implementasi Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan negara-negara lain karena karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan yang beragam. Luas wilayah kepulauan, kesenjangan infrastruktur antar wilayah, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program [1], [7]. Selain itu, isu mengenai kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi anggaran, mekanisme distribusi, serta pengawasan pelaksanaan program turut menjadi perhatian publik sejak program ini mulai diimplementasikan.

Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan, mendorong partisipasi warga, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik [8], [9]. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat memunculkan resistensi, penyebaran disinformasi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga melemahkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kepercayaan publik dibangun melalui praktik tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif [10], [11]. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, aspek-aspek tersebut tercermin dalam keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran, kualitas layanan penyediaan makanan, keamanan pangan, mekanisme pengawasan, komunikasi pemerintah, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak terbentuk hanya karena adanya program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga karena masyarakat meyakini bahwa program tersebut dikelola secara profesional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan, tata kelola, efektivitas program, analisis gizi, maupun dampaknya terhadap pendidikan dan kesehatan. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan berbagai temuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan publik dibangun dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai faktor-faktor pembentuk kepercayaan publik sangat penting sebagai dasar dalam memperkuat keberlanjutan implementasi program sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini disusun melalui pendekatan studi pustaka untuk mengkaji berbagai hasil penelitian mengenai implementasi program pemberian makan sekolah dan Program Makan Bergizi Gratis, kemudian mensintesis berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya kepercayaan publik. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi kebijakan publik sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program pemberian makan sekolah telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan, dampak terhadap status gizi dan pendidikan, tata kelola program, serta evaluasi pelaksanaannya.[1], misalnya, menyoroti bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi, hasil belajar, dan pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan aspek implementasi kebijakan dan tantangan operasional, seperti kesiapan infrastruktur, koordinasi lintas sektor, dan sistem distribusi. Kajian lain dilakukan oleh [7] yang menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun demikian, fokus penelitian masih terbatas pada efektivitas implementasi kebijakan dan belum mengkaji bagaimana proses implementasi tersebut memengaruhi terbentuknya kepercayaan publik terhadap program. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, [9] menjelaskan bahwa kepercayaan publik merupakan hasil dari transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan, komunikasi pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Temuan tersebut diperkuat oleh [10] serta [11] yang menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut masih membahas kepercayaan publik secara umum dan belum secara spesifik dikaitkan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, sejumlah penelitian mengenai program pemberian makan sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, keamanan pangan, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan pendanaan [4], [6], [7]. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai praktik implementasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada evaluasi program dan dampaknya terhadap kesehatan maupun pendidikan, sehingga belum mengintegrasikan aspek implementasi kebijakan dengan pembentukan kepercayaan publik.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis masih didominasi oleh pembahasan mengenai efektivitas implementasi, dampak program, serta tata kelola kebijakan. Kajian yang secara khusus mensintesis berbagai hasil penelitian untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan publik dibangun dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan studi pustaka dengan mengintegrasikan berbagai temuan empiris mengenai implementasi program pemberian makan sekolah, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik untuk menghasilkan sintesis konseptual tentang faktor-faktor yang membangun kepercayaan publik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menjadikan berbagai literatur ilmiah sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik kepercayaan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia [12]. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, seleksi, dan dokumentasi berbagai sumber literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh referensi yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, fokus pembahasan, metode penelitian, serta temuan utama. Dalam proses tersebut, peneliti menggunakan instrumen berupa lembar klasifikasi literatur, peta konsep, dan format pencatatan data untuk memudahkan proses identifikasi serta penyusunan hasil kajian secara sistematis [13].

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi yang terkandung dalam berbagai dokumen yang telah dipilih [14]. Melalui teknik ini, peneliti menganalisis pola-pola pembahasan mengenai kepercayaan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk faktor-faktor yang

memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, persepsi terhadap pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang muncul selama implementasinya. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan proses pengecekan silang (*cross check*) antar sumber pustaka, penelaahan ulang terhadap referensi yang digunakan, serta perbandingan berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur ilmiah [14]. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip kejelasan, koherensi, dan kemudahan dipahami sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian kepercayaan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Kajian Literatur

Program pemberian makan sekolah (*school feeding programme*) telah lama menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan anak. Program ini tidak hanya dipandang sebagai intervensi pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang yang berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah mampu meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan angka ketidakhadiran siswa, memperbaiki status gizi, serta meningkatkan partisipasi pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi [3], [15], [16].

Perkembangan program pemberian makan sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan ini terus mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Di negara-negara berpendapatan tinggi, program pemberian makan sekolah lebih diarahkan untuk membangun pola konsumsi sehat, mengurangi obesitas pada anak, dan membentuk perilaku hidup sehat sejak usia dini. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, program tersebut lebih difokuskan pada upaya mengatasi malnutrisi, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga miskin [17]. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pemberian makan sekolah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan masing-masing negara.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pemberian makan sekolah tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mendukung pelaksanaan program. [16] menjelaskan bahwa isu keberlanjutan, pengelolaan limbah makanan, integrasi pendidikan gizi, serta penguatan sistem pangan lokal menjadi perhatian utama dalam pengembangan program pemberian makan sekolah di berbagai negara. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun sistem implementasi yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Program ini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang bertujuan mengurangi stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak, memperbaiki hasil pendidikan, serta mempersiapkan generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045 [1], [2]. Dibandingkan berbagai program pemberian makan sekolah di negara lain, MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang jauh lebih luas karena menjangkau puluhan juta peserta didik dan kelompok rentan di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan yang strategis, implementasi Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan distribusi logistik menjadi salah satu persoalan utama, terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur sekolah, mekanisme pengadaan bahan pangan, hingga koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program [1], [2], [7]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG tidak hanya memerlukan dukungan anggaran yang besar, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan sumber daya secara efektif.

Kajian dari berbagai negara memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemberian makan sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat lokal. Penelitian [4] menunjukkan bahwa mayoritas penerima manfaat memandang program pemberian makan sekolah sebagai kebijakan yang penting karena mampu meningkatkan kehadiran, motivasi belajar, serta kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. Temuan serupa juga dikemukakan oleh [18] yang menjelaskan bahwa guru menilai program pemberian makan sekolah mampu

meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus mengurangi hambatan belajar yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi.

Pengalaman implementasi di India melalui program *Midday Meal Scheme* memperlihatkan bahwa pemberian makan sekolah berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dalam skala nasional [5]. Sementara itu, Program Peningkatan Nutrisi di Tiongkok tidak hanya meningkatkan capaian akademik peserta didik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan akses pendidikan menengah [19]. Berbagai hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa investasi pada program pemberian makan sekolah memiliki manfaat multidimensional yang melampaui tujuan pemenuhan kebutuhan gizi semata.

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program pemberian makan sekolah menghadapi tantangan yang relatif serupa di berbagai negara. Permasalahan kualitas makanan, keterbatasan pendanaan, kapasitas kelembagaan, koordinasi antar instansi, hingga keberlanjutan pembiayaan merupakan isu yang terus muncul dalam berbagai konteks implementasi. Di Brazil, tantangan utama terletak pada integrasi program dengan sektor pertanian keluarga dan mekanisme birokrasi, sedangkan di Ghana dan Kenya tantangan lebih banyak berkaitan dengan keberlanjutan pendanaan, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi kelembagaan [3], [20], [21]. Persamaan berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makan sekolah pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola kebijakan.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang memiliki dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial secara sekaligus. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya tidak cukup diukur melalui indikator kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang diserap, tetapi juga melalui kualitas proses implementasi yang mencakup efektivitas koordinasi kelembagaan, pemerataan distribusi, kualitas pelayanan, keamanan pangan, serta kemampuan pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Dengan demikian, kajian mengenai implementasi MBG tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai faktor-faktor yang membentuk kepercayaan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan publik pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat.

3.2 Faktor-Faktor yang Membangun Kepercayaan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Kepercayaan publik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam perspektif administrasi publik, kepercayaan masyarakat tidak muncul secara otomatis ketika pemerintah meluncurkan sebuah program, tetapi dibangun melalui proses implementasi yang menunjukkan integritas, transparansi, kualitas pelayanan, serta kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat. [9] menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan hasil interaksi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipahami tidak hanya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai proses membangun legitimasi pemerintah melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang berperan dalam membentuk kepercayaan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis, yaitu transparansi dan akuntabilitas, kualitas pelayanan dan keamanan pangan, pemerataan distribusi serta kapasitas implementasi, dan komunikasi publik yang efektif.

3.2.1 Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor yang paling dominan dalam membangun kepercayaan publik terhadap suatu kebijakan pemerintah. Masyarakat cenderung memberikan kepercayaan apabila memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan program, mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta hasil yang dicapai. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dan lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap penyelenggaraan program. Keterbukaan data pemerintah melalui sistem informasi publik mampu meningkatkan pengawasan masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam mengawal implementasi kebijakan [22]. Ketersediaan informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian [23] yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas penyelenggara program.

Dalam konteks MBG, transparansi menjadi semakin penting karena program ini melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar serta melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, hingga masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan yang terbuka, sistem pengawasan yang efektif, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program.

3.2.2 Kualitas Pelayanan dan Keamanan Pangan

Selain tata kelola, kualitas pelayanan juga menjadi faktor yang menentukan persepsi masyarakat terhadap keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Dalam program pemberian makan sekolah, kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya makanan, tetapi juga menyangkut mutu gizi, cita rasa, kebersihan, keamanan pangan, serta ketepatan waktu distribusi.

Penelitian [24] menunjukkan bahwa sebagian besar siswa lebih menyukai makanan yang disiapkan oleh keluarga dibandingkan makanan yang diproduksi secara massal karena mempertimbangkan aspek rasa, kebersihan, dan keamanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan penerima manfaat sangat dipengaruhi oleh kualitas makanan yang disediakan. Apabila kualitas makanan tidak memenuhi harapan masyarakat, maka kepercayaan terhadap program juga berpotensi menurun.

Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian penting dalam implementasi MBG. [25] mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas produksi, kesiapan sumber daya manusia, pengawasan sanitasi, hingga risiko keracunan makanan apabila standar keamanan pangan tidak diterapkan secara konsisten. Temuan tersebut didukung oleh [26] yang menyatakan bahwa sistem produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan yang terstandarisasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi risiko kegagalan implementasi program.

Dengan demikian, kualitas pelayanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menentukan keberhasilan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat mengenai profesionalisme pemerintah dalam mengelola kebijakan publik.

3.2.3 Pemerataan Distribusi dan Kapasitas Implementasi

Kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjamin pemerataan akses terhadap manfaat program. Dalam negara yang memiliki karakteristik geografis seperti Indonesia, distribusi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi MBG. Wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta keterbatasan infrastruktur logistik menyebabkan kualitas layanan yang diterima masyarakat berpotensi berbeda antar wilayah. Disparitas distribusi merupakan salah satu kendala utama implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia [7]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program di tingkat pusat, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pelaksanaan program.

Pengalaman berbagai negara memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi program pemberian makan sekolah sangat bergantung pada kapasitas institusional di tingkat lokal. Penelitian [27] menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal melalui pendekatan *home-grown school feeding* mampu meningkatkan keberlanjutan program sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Sementara itu, [28] menemukan bahwa pemerataan akses terhadap makanan sekolah mampu meningkatkan keamanan pangan keluarga, mengurangi beban ekonomi rumah tangga, dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program.

Selain pemerataan distribusi, koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas implementasi. Program MBG melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, pelaku usaha pangan, dan masyarakat. Menurut [29], keberhasilan program hanya dapat dicapai apabila koordinasi antar aktor berjalan secara efektif sehingga setiap tahapan implementasi dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Pengalaman Brazil maupun Tanzania juga menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan yang baik menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan program pemberian makan sekolah [3], [6].

3.2.4 Komunikasi Publik dan Persepsi Masyarakat

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam membangun kepercayaan publik adalah komunikasi pemerintah. Kebijakan publik yang baik memerlukan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan tujuan program, manfaat yang akan diperoleh masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan secara terbuka dan mudah dipahami. Komunikasi yang efektif akan memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus mengurangi munculnya kesalahpahaman maupun disinformasi. Komunikasi publik berperan penting dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, meskipun masih ditemukan kesenjangan akses informasi akibat keterbatasan infrastruktur

digital di beberapa wilayah [30]. Di sisi lain, [31] menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran strategis sebagai media komunikasi kebijakan sekaligus sarana membangun literasi gizi melalui interaksi antara guru, siswa, dan orang tua.

Perkembangan media sosial juga turut memengaruhi pembentukan opini publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian [32] menunjukkan bahwa sentimen masyarakat terhadap program MBG didominasi oleh persepsi positif, meskipun masih terdapat kekhawatiran mengenai transparansi, kualitas makanan, dan pemerataan distribusi. Temuan tersebut diperkuat oleh [33] yang menyatakan bahwa generasi muda pada umumnya mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi tetap memberikan perhatian terhadap kualitas tata kelola pemerintah dalam mengimplementasikan program tersebut. Dalam konteks tersebut, kepercayaan publik tidak hanya dibentuk oleh manfaat nyata yang diterima masyarakat, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang terbuka, responsif, dan mampu mengatasi berbagai bentuk disinformasi yang berkembang di ruang publik. Dengan demikian, komunikasi publik menjadi instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus menjaga keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Secara keseluruhan, sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis merupakan hasil interaksi antara kualitas tata kelola, mutu pelayanan, kapasitas implementasi, serta efektivitas komunikasi pemerintah. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan publik tidak dapat dilakukan melalui satu aspek saja, melainkan memerlukan penguatan tata kelola yang terintegrasi agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis mampu memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Kepercayaan Publik dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan suatu konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara kualitas tata kelola, kapasitas implementasi, pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat, serta efektivitas komunikasi pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari pelaksanaan suatu program, melainkan sebagai hasil dari proses implementasi kebijakan yang mampu memenuhi harapan masyarakat secara konsisten.

Berbagai penelitian yang telah dikaji memperlihatkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi pemerintah melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam perspektif kebijakan publik, masyarakat akan memberikan kepercayaan apabila pemerintah mampu menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat [10], [11]. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBG harus dipahami sebagai keberhasilan membangun hubungan yang saling mempercayai antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan sintesis literatur, terdapat empat dimensi utama yang membentuk kepercayaan publik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, yaitu dimensi tata kelola, dimensi operasional, dimensi sosial, dan dimensi komunikasi.

Dimensi pertama adalah tata kelola pemerintahan. Berbagai penelitian menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam membangun legitimasi kebijakan publik. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan pangan, proses distribusi, serta sistem pengawasan akan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa program dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab [9], [34]. Sebaliknya, lemahnya transparansi berpotensi menimbulkan keraguan terhadap efektivitas program serta membuka ruang bagi munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap MBG.

Dimensi kedua adalah kualitas implementasi atau dimensi operasional. Kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman nyata yang mereka rasakan selama program berlangsung. Kualitas makanan yang disajikan, keamanan pangan, ketepatan waktu distribusi, kecukupan sarana dan prasarana, serta kompetensi sumber daya manusia merupakan indikator yang secara langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas implementasi yang baik akan meningkatkan kepuasan penerima manfaat, sedangkan berbagai permasalahan teknis seperti kualitas makanan yang rendah, distribusi yang terlambat, maupun lemahnya pengawasan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program [24], [25], [35].

Dimensi ketiga adalah dimensi sosial, yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program. Kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makan sekolah di berbagai negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat, sekolah, orang tua, pelaku usaha lokal, dan komunitas dalam mendukung keberlanjutan program. Keterlibatan berbagai aktor tersebut memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kebijakan sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program [6], [36]. Dalam konteks Indonesia, pelibatan petani lokal, UMKM pangan, komite sekolah, serta pemerintah daerah dapat memperkuat keberlanjutan implementasi MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat karena manfaat program dirasakan secara lebih luas.

Dimensi keempat adalah komunikasi publik. Literatur menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, konsisten, dan berbasis bukti merupakan instrumen penting dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Di era digital, penyebaran informasi melalui media sosial berlangsung sangat cepat sehingga pemerintah dituntut mampu memberikan informasi yang akurat sekaligus merespons berbagai bentuk disinformasi yang berkembang di ruang publik [33], [37]. Selain itu, komunikasi yang efektif juga harus disertai dengan peningkatan literasi gizi masyarakat sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipahami sebagai pemberian makanan gratis, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam membentuk kepercayaan publik. Tata kelola yang baik akan memperkuat kualitas implementasi, implementasi yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat, kepuasan masyarakat akan mendorong partisipasi publik, sedangkan komunikasi yang efektif akan memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus menjaga keberlanjutan dukungan masyarakat terhadap program. Dengan demikian, kepercayaan publik merupakan hasil dari sinergi berbagai aspek yang saling mendukung dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, pembangunan kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis memerlukan beberapa strategi yang saling melengkapi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem tata kelola melalui peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi informasi, serta mekanisme evaluasi yang akuntabel. Kedua, peningkatan kualitas implementasi harus dilakukan melalui penguatan standar keamanan pangan, pelibatan tenaga gizi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem distribusi terutama di wilayah 3T. Ketiga, penguatan kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, pelaku usaha lokal, organisasi masyarakat, dan komunitas sebagai mitra implementasi program. Keempat, strategi komunikasi publik harus diarahkan pada penyampaian informasi yang terbuka, edukatif, dan responsif terhadap berbagai dinamika opini publik sehingga mampu mengurangi disinformasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, hasil studi pustaka ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik, implementasi yang berkualitas, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan komunikasi publik yang efektif. Keempat aspek tersebut membentuk suatu kerangka konseptual yang dapat menjadi landasan dalam memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi program ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, kualitas serta keamanan pangan yang terjamin, pemerataan distribusi, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta komunikasi publik yang terbuka dan responsif. Sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor penting yang menentukan legitimasi, penerimaan, dan keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas implementasi, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, dan komunikasi yang partisipatif perlu menjadi prioritas agar Program Makan Bergizi Gratis mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para peneliti yang karya-karyanya menjadi sumber rujukan dalam penyusunan studi pustaka ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan kepercayaan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. H. Lenny Marzulina Amirul Mukminin, "Feeding Minds, Building Dignity: Indonesia's Free Nutritious Meal Policy (MBG), Barriers, Prospects, and Policy Recommendations," *Edukasi J. Pendidik. dan Pengajaran*, 2025.
- [2] M. Hadinata, "Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A Policy, Fiscal, and Political Analysis Grounded in International Evidence," *J. Bina Praja*, 2026.
- [3] R. R. H. Mpogole, Hunter, D. Ochieng, and D. Kejo, "Policies, Multi-Stakeholder Approaches and Home-Grown School Feeding Programs for Improving Quality, Equity and Sustainability of School Meals in Northern Tanzania," *Front. Sustain. Food Syst.*, 2021.
- [4] A. Gizaw and T. Andualem, "Assessing the Educational Effect, Student Perceptions, and Satisfaction with School Feeding Programs in Addis Ababa's Public Primary Schools," *Ethiop. J. Behav. Stud.*, 2025.
- [5] D. S. Rajshri Jayaraman, "The Impact of School Lunches on Primary School Enrollment: Evidence from India's Midday Meal Scheme," *Scand. J. Econ.*, 2015.
- [6] C. Hawkes, B. G. Brazil, and I. R. R. de C. P. C. Jaime, "How to engage across sectors: lessons from agriculture and nutrition in the Brazilian School Feeding Program," *Rev. Saude Publica*, 2016.
- [7] M. R. Namsa, "Analysis Implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) Policy in Indonesia (Edward III Implementation Model)," *J. Sains Sos. dan Hum.*, 2026.
- [8] A. Amirkhanyan, F. Roberts, K. J. Meier, and M. Song, "Examining attitudes toward public participation across sectors: An experimental study of food assistance," *Public Adm.*, 2024.
- [9] M. C. Decena, "BRIDGING POLICY AND PEOPLE: A QUALITATIVE STUDY ON PUBLIC TRUST IN GOVERNMENT INSTITUTIONS," *J. Soc. Stud.*, 2026.
- [10] S. A. Hussain, S. S. Khan, A. Gulzar, and A. Sheikh, "The Role of Public Policy in Promoting Transparent Governance and Accountability in Developing Countries," *Rev. Educ. Adm. & Law*, 2025.
- [11] N. Rahmawati and M. Z. Tjenreng, "Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis," *J. PKM Manaj. Bisnis*, 2025.
- [12] Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D," *Alf. Bandung*, 2016.
- [13] M. Zed, *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- [14] S. Arikunto and A. Jabar, "Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara," *Furchan, A.(2004). Pengantar Penelit. dalam Pendidikan.(Yogyakarta Pustaka Pelajar). Husaini dan Purnomo.(2017). Metodol. Penelit. Sos. Bumi Aksara*, 2004.
- [15] M. Oostindjer *et al.*, "Are school meals a viable and sustainable tool to improve the healthiness and sustainability of children's diet and food consumption? A cross-national comparative perspective," *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, 2016.
- [16] M. Naufal *et al.*, "Unraveling Future Trends in Free School Lunch and Nutrition: Global Insights for Indonesia from Bibliometric Approach and Critical Review," *Nutrients*, 2025.
- [17] S. H. Ruzky Aliyar Aulo Gelli, "A Review of Nutritional Guidelines and Menu Compositions for School Feeding Programs in 12 Countries," *Front. Public Heal.*, 2015.
- [18] O. Niyibizi, "Teachers' Perceptions of Influence of Daily School Feeding Programs on Student Participation and Dropout Rates," *J. Classr. Pract.*, 2024.
- [19] Z. M. Ma, Y. Fan, and W. Z. Zengzeng, "Free school meals and educational outcomes: evidence from China's Nutrition Improvement Program," *Front. Public Heal.*, 2025.
- [20] J. A. Pasha, T. H. Mauludi, and M. I. A. Muhyidin, "Free school meals policy: how are they governed? comparing India, the USA, Japan, and South Korea," *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, 2025.
- [21] D. Mendonça *et al.*, "Perception of the operating agents about the Brazilian National School Feeding Program," *Rev. Saude Publica*, 2019.
- [22] R. Hidayat, "Digital governance and transparency: How open data initiatives enhance government accountability," *J. Gov. Regul.*, 2025.
- [23] G. M. Darma, I. K. Mastika, H. Karyadi, H. Prayitno, N. S. Participação, and P. I. Público, "Regional Governance Based on Public Value: Study in East Ogan Komering Ulu Regency Government, Indonesia," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, 2024.
- [24] T. Taufikin, "Beyond Free Meals in Elementary Education: Rethinking School Nutrition Policy through Cultural Trust,

- Efficiency, and Islamic Justice in Indonesia,” *BASICA*, 2026.
- [25] K. Y. F., M. E. Ga’a, J. T. B, and B. D. V, “Perceptions of teachers on the Free Nutritious Meal Program implementation in Indonesia: Benefits and challenges,” *Pedago. J. Ilm. Pendidik.*, 2025.
- [26] S. I. Agyemang *et al.*, “Ready-to-Use School Meals in Northern Ghana Are a Viable Alternative to Traditional School Meals,” 2025.
- [27] M. M. L. Matumba *et al.*, “Long-term sustainability of African school feeding programs, a review,” *Front. Sustain. Food Syst.*, 2024.
- [28] P. M. Sebleau, B. Swinburn, R. Glassey, D. Tipene, and L. S. Gerritsen, “Health, wellbeing and nutritional impacts after 2 years of free school meals in New Zealand,” *Health Promot. Int.*, 2023.
- [29] U. I. Soponyono Soponyono, “Controversy Surrounding Indonesia’s Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Policy Effectiveness and Governance Challenges,” *J. Creat. Power Ambition*, 2026.
- [30] M. Muryali, A. Yani, A. Aiyub, N. Nazaruddin, and M. Maryam, “Publicity as a Policy Instrument: Analyzing Communication Strategies and Public Perception of Aceh’s Teacher Capacity Enhancement Policy,” *Electron. J. Educ. Soc. Econ. Technol.*, 2025.
- [31] I. Wahyudi and L. K. Cahyawati, “Strengthening the Free Nutritious Meal Program: School-Level Evidence on Nutrition Literacy as an Emerging Mechanism,” *J. Bina Praja*, 2026.
- [32] M. Saleh and R. Imanda, “Public Sentiment Analysis of the Free Meal Program: A Comparison of Naive Bayes and Support Vector Machine Methods on the Twitter (X) Social Media Platform,” *J. Appl. INFORMATICS Comput.*, 2025.
- [33] A. L. Tambunan *et al.*, “Persepsi Generasi Muda terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan Dampak Kepercayaan Publik kepada Pemerintah,” *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, 2026.
- [34] K. Dauhi, R. Tohopi, F. P. Tui, and A. H. Badjuka, “Accountability in Village Fund Management: A Qualitative Study of Transparency, Responsibility, Control, and Responsiveness in Tilango District, Gorontalo Regency,” *Abdurrauf Sci. Soc.*, 2025.
- [35] E. N. W. PrismaLinda, “JURIDICAL ANALYSIS OF THE GOVERNMENT’S NEGLECT OF THE NUTRITIONIST’S ROLE IN THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM,” *Int. Semin.*, 2025.
- [36] S. T. Andini, “Free Nutritious Meals and Food Availability: Strengthening Community Nutrition for Indonesian Children,” *J. Nutr. Heal. Care*, 2025.
- [37] N. L. Aris Sarjito, “Disinformation’s Influence on Public Perception and Defense Policy Implementation in Indonesia,” *Multidiscip. Sci. J.*, 2025.